

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI



**OLEH
RIDHA ASMA FAUZIYYAH
NIM 105730536615**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

**OLEH
RIDHA ASMA FAUZIYYAH
NIM 105730536615**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik”

(QS. Al Kahf : 2)

“Karena Bapakku dan Ibuku merupakan motivasi dalam hidupku”

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT. Ku persembahkan karya tulis ini untuk:

- ❖ *Bapakku Juhasdi, S.Sos dan Ibuku Sitti Rosminah, S.Pd tersayang, terima kasih telah memberikan dukungan, do'amu yang tiada terputus, kerja keras yang tiada henti, serta pengorbanan yang tiada terbatas. Semuanya membuatku bangga memiliki kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayangmu.*
- ❖ *Adikku Aliyahtul Jannah, terima kasih karena senantiasa menyemangatiku menyelesaikan skripsi.*
- ❖ *Teruntuk Rachmatullah Rumbu, SE, terima kasih atas cinta, kasih sayang yang senantiasa memberiku motivasi dengan perhatian dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi.*
- ❖ *Teruntuk keluarga semua yang senantiasa memberi semangat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi.*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"

Nama Mahasiswa : Ridha Asma Fauziyyah
No. Stambuk/NIM : 105730536615
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Amir, S.E.,M.Si.AK.CA
NIDN : 0031126404

Andi Arman, S.E., M.Si.Ak.CA
NIDN : 0906126701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA. CSP
NIDN : 0915058801



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

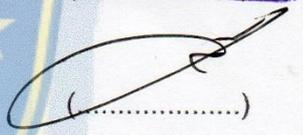
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Ridha Asma Fauziyyah**, NIM **105730536615** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 145/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 31 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Dzul Hijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

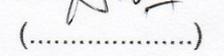
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
3. Hasanuddin, SE., M.Si
4. Amran, SE., M.Ak.Ak., CA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridha Asma Fauziyyah

Stambuk : 105730536615

Progra Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Ridha Asma Fauziyyah

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Ismail Rasulong, SE.,MM
NIDN : 0905107302

Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN : 0915058801

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir yang berjudul: "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto". Skripsi dimaksudkan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Amir, SE., M.Si. Ak.CA. selaku Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
5. Bapak Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA. selaku Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan masukan positif kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
7. Segenap Pimpinan dan Pegawai BPKAD Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan bantuan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian.
8. Segenap Pimpinan dan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama dan memberi bantuan serta dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Tugas Akhir Skripsi.

Menyedari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dan semoga skripsi penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Terhadap semuanya penulis

tidak dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT.
semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Billahi fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Agustus 2019

Penulis



ABSTRAK

Ridha Asma Fauziyyah, Tahun 2019. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, Skripsi Program Sudi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Amir, SE., M.Si.Ak.CA. dan Pembimbing II Andi Arman, SE., M.Si.Ak.CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini sebagian pegawai BPKAD Kabupaten Jeneponto dan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner. Sampel dalam penelitian ini yaitu 51 yang diambil dengan metode *purposive sampling*. Alat yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Ridha Asma Fauziyyah, 2019. *Effect of Regional Financial Accounting Systems and Internal Control Systems on the Quality of the Jeneponto Regency Government's Financial Statements*, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Amir, SE., M.Sc.Ak.CA. and Advisor II Andi Arman, SE., M.Sc.Ak.CA.

This study aims to determine whether the Effect of Regional Financial Accounting Systems and Internal Control Systems on the Quality of the Regional Government's Financial Statements in Jeneponto Regency.

This research uses quantitative methods. The population in this study were part of the Jeneponto Regency BPKEP staff and the Jeneponto Regency Inspectorate staff. The data collection technique used was a questionnaire. The data used in this study are primary data obtained from respondents who filled out the questionnaire. The sample in this study was 51 taken by purposive sampling method. The tool used for this study uses the classic assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing.

Based on the results of the study indicate that the regional financial accounting system variables and internal control systems have a positive and significant effect on the quality of the Jeneponto Regency's financial statements.

Keywords : Regional Financial Accounting System, Internal Control System, Quality of Regional Government Financial Statements

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Penelitian Terdahulu	16
C. Kerangka Konsep	22
D. Hipotesis	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Definisi Operasional Variabel	25
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 4.1	Proses Pembagian Kuesioner	50
Tabel 4.2	Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.3	Usia Responden	51
Tabel 4.4	Pendidikan Responden	52
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.7	Analisis Regresi Berganda	56
Tabel 4.8	Uji Statistik t	57
Tabel 4.9	Uji Statistik F	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKAD	36
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	44
Gambar 4.3	Hasil Uji Hetereskedastisitas	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Jawaban Responden
Lampiran 3	Deskriptif Statistik
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan rakyat kepada organisasi sektor publik semakin menguat di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Berkaitan dengan transparansi yang merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai dan yang terkait dengan akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelolah sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan setiap aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Meriansa, 2017).

Reformasi dibidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Yayah Handani, 2011).

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga dijelaskan Bahwa sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menerangkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah

telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memegang peranan penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto menggunakan aplikasi komputer, tetapi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya yaitu belum tersedianya tenaga akuntansi yang memiliki kompetensi dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan, sehingga aparat pengelola keuangan belum maksimal dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Serta terdapat masalah terhadap server yang digunakan belum efektif.

Selain itu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di danai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun meskipun telah melakukan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dari hasil pemeriksaan BPK RI, tetap saja ditemukan kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di daerah kabupaten Jeneponto. Terkait dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 yang masih menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan lemahnya pengendalian intern dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : **“PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Jeneponto
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang berguna bagi instansi di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, bertanggungjawab, dan akuntabel.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas serta menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktiknya.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna sebagai referensi serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Agency Theory

Dalam sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis sumber prinsipal agen dalam kaitannya dalam penganggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 2012 dalam Parawati, 2015).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menerapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tertentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Subekti, Rizana, dan Novriyandana, 2015).

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2009) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan adalah informasi yang di sajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2007) .

b. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

c. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

d. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitas yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

1) Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a) Manfaat umpan balik (feedback value)
- b) Manfaat prediktif (predictive value)
- c) Tepat waktu (timeliness)
- d) Lengkap

2) Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut.

Suatu informasi dikatakan andal apabila :

- a) Dapat diuji kebenarannya
 - b) Netral
 - c) Penyajian secara wajar/jujur
- 3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- 4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

b. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2012: 84) Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset. Disempurnakan oleh Permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tangan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5) Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

4. Sistem Pengendalian Intern

a. Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah: "Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang di pengaruhi oleh manajemen yang diciptakan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah".

Sistem Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Rai, 2008:283).

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah metode, proses, dan kebijakan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

b. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 menyatakan bahwa unsur Sistem Pengendalian Intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

- 1) Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personal organisasi mengenai pengendalian.
- 2) Pengendalian Risiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- 3) Kegiatan Pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen
- 4) Informasi dan Komunikasi. Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya

salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan.

- 5) Pemantauan. Kegiatan pengelolaan rutin supervise, perbandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013:163) tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi,
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Dilihat dari tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua (Bastian dan Gatot, 2002: 204), yaitu :

- 1) Pengendalian Intern Akuntansi. Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggungjawab antar unit organisasi.
- 2) Pengendalian Administrasi. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan

untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Gyshella Smylie Lumintang, Linda Lambey, Steven J. Tangkuman	Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Manado)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado 2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado.
2.	Novtania Mokoginta, Linda Lambey,	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sistem Pengendalian

	Winston Pontoh	Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah		Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3.	Tuti Herawati	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, Secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara parsial, terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4.	Oka Reza Aditya	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap	Deskriptif dan asosiatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa

		Kualitas Laporan Keuangan		pelaksanaan sistem pengendalian intern terdapat kualitas laporan keuangan daerah menghasilkan pengaruh yang kuat dan positif.
5.	Teuku Fahrian Nagor, Dr. Darwanis, M.Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE., M.Si, Ak	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat	Kuantitatif	Hasil penelitian ini, penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Penerapan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6.	Noprial Valenra Maksyur	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan	Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah

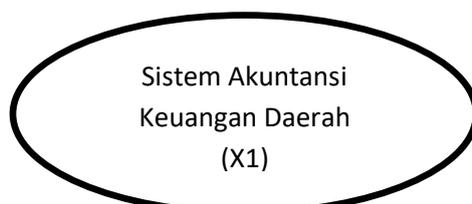
		Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu		Kabupaten Indragiri Hulu.
7.	Suci Rahmadani	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat)	Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan hasil bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan hasil bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8.	Dicky Rahman	Pengaruh Pemanfaatan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini, Penerapan Sistem

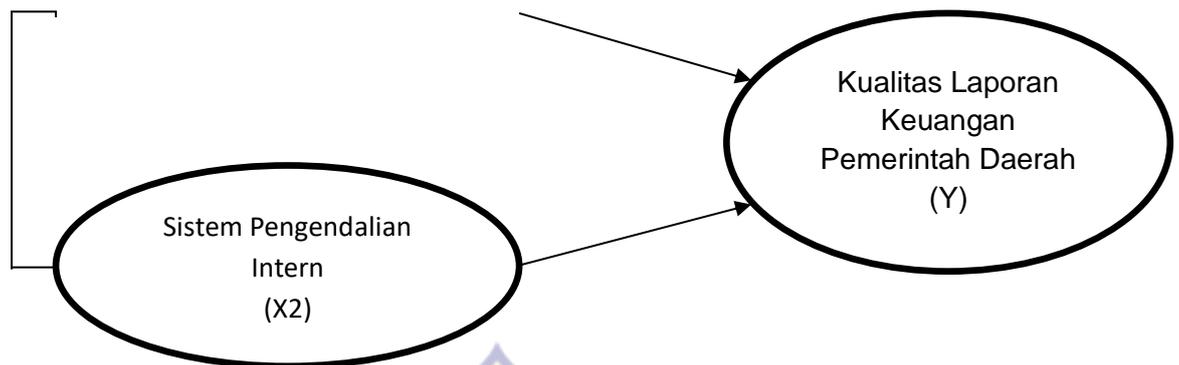
		<p>Teknologi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)</p>		<p>Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau. Dimana, semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau.</p>
9.	<p>Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka</p>	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian, dapat disimpulkan: 1) Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3) Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

10.	As Syifa Nurillah, Dul Muid	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan hipotesis kedua (H2) dapat diterima, maka variabel penerapan SAK berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pernyataan hipotesis keempat (H4) dapat diterima, maka variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
-----	-----------------------------	--	-------------	---

Tabel penelitian di atas menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel sistem pengendalian intern menunjukkan pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Konsep





Gambar 2.1

Kerangka Konsep

D. Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1 : Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetisi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

H3 : Sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Muncoro (2013: 145) Jenis penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada 2 Instansi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berlokasi di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto, lebih tepatnya di Jalan Pahlawan No. 1, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Sedangkan waktu penelitian sampai dengan tahap perampungan di perkirakan kurang lebih dua bulan pada bulan Mei dan Juni tahun 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yakni; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

b. Variabel Independen

1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

2) Sistem Pengendalian Intern (X2)

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pengukuran

Sesuai dengan judul proposal yang diteliti yaitu “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto” maka terdapat tiga variabel penelitian yaitu:

- 1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)
- 3) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya kedalam bentuk operasionalisasi variabel yang dapat dilihat berikut ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	1. Pencatatan 2. Penggolongan dan Pengikhtisaran 3. Pelaporan	Ordinal	Primer
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern	Ordinal	Primer

3.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Ordinal	Primer
----	---	--	---------	--------

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan (Kasmadi & Sunariah, 2016 : 65). Populasi dalam penelitian ini sebagian pegawai di BPKAD Kabupaten Jeneponto dan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto. Alasan pemilihan Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian karena penilaian terhadap keuangan daerah Kabupaten Jeneponto mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sampel

Menurut Kasmadi dan Sunariah, 2016 : 66) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu pegawai BPKAD Kabupaten Jeneponto dan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 51 kuesioner.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto serta Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

F. Teknik Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terkait (independen) dan variabel bebas (dependen) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghazali, 2013:160). Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyamar di atas dan dibawa angka 0 pada sumbu Y (Imam Ghozali, 2013: 139-143).

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan jika peneliti bermaksud meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor (Sugiyono, 2010 : 275). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan =

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

a = Konstan

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X1 = Sistem akuntansi Keuangan daerah

X2 = Sistem pengendalian intern

e = Standar Error (5%)

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji *t*) dan pengujian secara simultan (uji *F*). Hipotesis yang akan diujikan dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel bebas yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern serta variabel terikat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Sugiyono (2013:64) Pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

a. Uji Statistik *t* (Pengujian Secara Parsial)

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji t-statistik. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Dari hasil hipotesis t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada signifikansi $0,05 / \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada signifikansi $0,05 / \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

Bila hasil pengujian statistik menunjukkan H_0 ditolak, berarti variabel-variabel independennya yang sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi apabila H_0 diterima, berarti variabel-variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan)

Setelah melakukan uji t peneliti melakukan uji F dimana uji F berfungsi untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Ghozali (2016) mengungkapkan Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada output program pengolah data dapat dilihat pada tabel ANOVA. F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap nilai variabel secara bersama-sama
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap nilai variabel secara bersama-sama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BPKAD Kabupaten Jeneponto

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dibentuk dan disahkan menjadi salah satu SKPD di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 3 Agustus 2009. BPKAD merupakan gabungan dari 2 Organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah dengan nama DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kemudian pada pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yaitu Tahun 2017, Bidang Pendapatan menjadi SKPD baru dengan nama Badan Pendapatan Daerah sehingga DPPKAD berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 Kesekretarian dan 4 Bidang, yaitu: Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Asset.

a. Suktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jeneponto

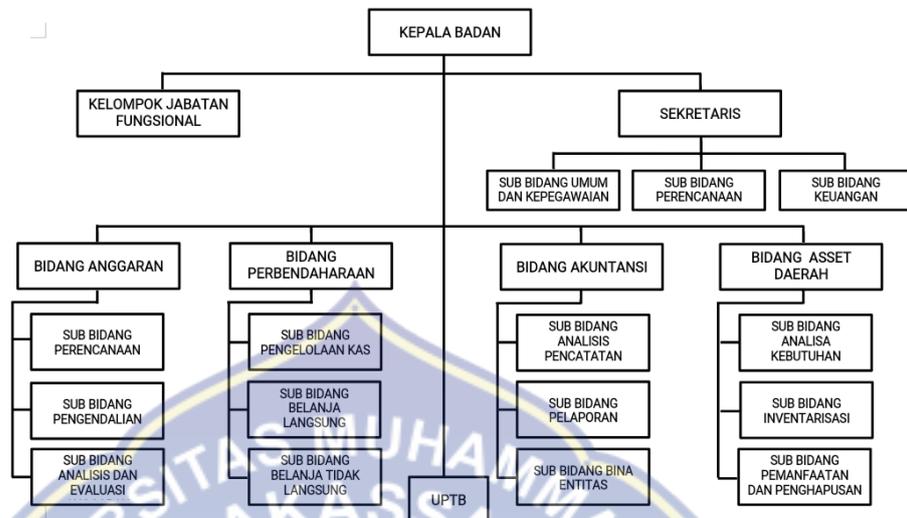
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekertaris
 - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bidang Program
 - c. Sub Bidang Keuangan

3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - c. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
 - c. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
5. Bidang Akuntansi
 - a. Sub Bidang Analisis Pencatatan Transaksi
 - b. Sub Bidang Pelaporan
 - c. Sub Bidang Bina Entitas Akuntansi
6. Bidang Asset
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Daerah
 - b. Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah
 - c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTB

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Jeneponto



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto (2019)

Rincian tugas dan fungsi satuan organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah serta merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, asset daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Tugas pokok Kepala Badan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan/program BPKAD
- 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 4) Mengoptimalkan realisasi penerimaan sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan dalam APBD tahun berjalan;
- 5) Menyiapkan laporan keuangan dan laporan perhitungan APBD untuk disetujui Bupati;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sekertariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola administrasi yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tugas pokok Sekretaris sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan/program Bagian Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- 2) Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang relevan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- 3) Melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi umum. Urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis administasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program dan urusan rumah tangga;
- 5) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- 6) Melaksanas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyampaikan arahan dan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja dan pembahasannya oleh Tim Anggaran Eksekutif, mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan melakukan revisi RAPBD sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menyusun anggaran satuan kerja.

Tugas pokok bidang anggaran sebagai berikut:

- 1) Mengatur urusan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengendalian dan penatausahaan anggaran,

pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah);

- 2) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD;
- 3) Melaksanakan penyusunan anggaran kas daerah dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 4) Melaksanakan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD dan surat penyediaan dana;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), pemeriksaan Surat Permintaan Pencairan (SPP), dan pembinaan administrasi pemegang kas (Bendahara).

Tugas pokok Bidang Perbendaharaan sebagai berikut:

- 1) Mengatur urusan pengelolaan belanja daerah tidak langsung dan pembiayaan daerah, pengelolaan belanja langsung dan pengelolaan kas daerah;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, pengelolaan belanja langsung dan pengelolaan kas daerah;

- 3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengeluaran kas daerah (cash out flow);
- 4) Melaksanakan pengendalian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi asset dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto.

Tugas pokok Bidang Akuntansi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Melaksanakan pengendalian kegiatan akuntansi manajemen, keuangan, sistem informasi keuangan;
- 3) Melaksanakan penyampaian laporan keuangan yang *auditabel* secara berkala beserta perinciannya, baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang memadai dalam rangka pengembangan sistem

informasi akuntansi dan keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;

- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Asset Daerah

Bidang Asset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Asset yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi perencanaan, kebutuhan barang, pemeliharaan, pelaporan, analisa dan penghapusan asset milik Pemerintahan Kabupaten Jeneponto.

Tugas Pokok Bidang Asset Daerah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan kebutuhan aset, analisa aset serta mutasi dan penghapusan aset;
- 2) Melakukan perumusan dan pengendalian jumlah kebutuhan aset pada masing-masing SKPD dan lembaga terkait dalam rangka perencanaan kebutuhan aset daerah;
- 3) Melaksanakan rumusan pelaksanaan pemeriksaan, pemanfaatan, pengamanan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- 4) Melaksanakan perumusan dalam rangka penyusunan standarisasi satuan harga barang milik daerah dan standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto memiliki visi:

“Menjadi pengelola keuangan dan asset daerah yang dipercaya, akuntabel, profesional, dan melayani untuk mewujudkan pemerintahan yang baik”

2. Misi Organisasi

Berikut merupakan misi dari BPKAD Kabupaten Jeneponto:

- 1) Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati, dan bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penyesuaian prioritas pengeluaran, penurunan defisit fiskal, perbaikan kesinambungan fiskal, ketahanan sistem keuangan, dan kredibilitas kebijakan keuangan daerah.
- 2) Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang optimal sesuai dengan asas efisiensi, efektif, fungsional, kepastian hukum, transparan, dan bertanggungjawab
- 3) Membangun dan mengembangkan sumber daya aparatur pengelola keuangan yang amanah, profesional, berintegritas, kompeten, dan berkinerja tinggi yang didukung oleh teknologi informasi pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan fungsi masing-masing bidang
- 5) Mengedepankan akuntabilitas keuangan daerah

2. Sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto

Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto yang baru dibentuk Tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan daerah.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari Sekertaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

a. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jeneponto

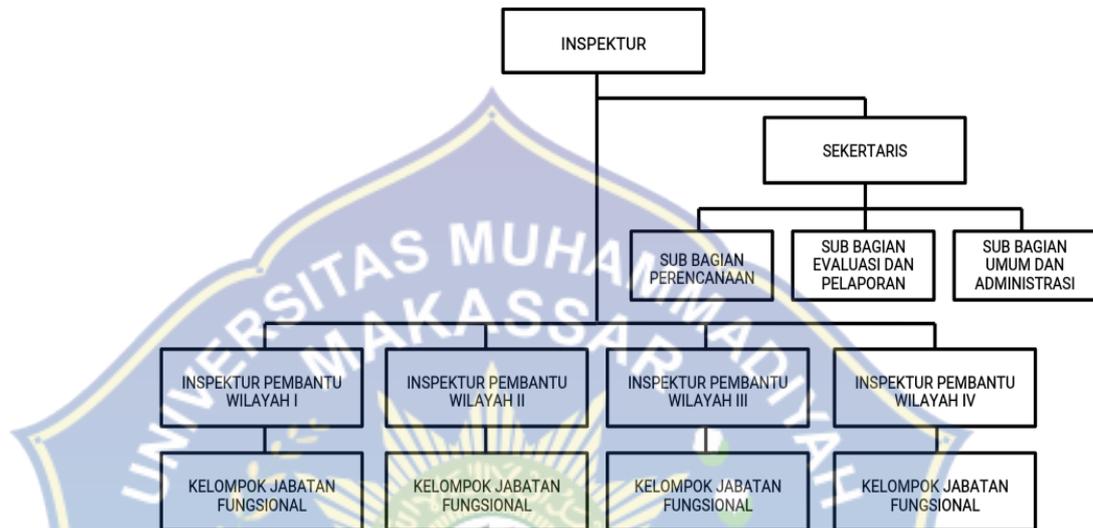
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

1. Inspektur (Eselon II.b)
2. Sekertaris (Eselon III.a) yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV.a)
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a)
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IV.a)
3. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III.a)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III.a)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III.a)

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III.a)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto (2019)

Rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Inspektorat Daerah;

- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Inspektorat Daerah;
- 3) Mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Inspektorat Daerah;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekertaris

Sekertris dipimpin oleh seorang Sekertaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur lingkup Inspektorat Daerah;

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan Sekertaris Inspektorat untuk dijadikan acuan kerja;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- 3) Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan memperhatikan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
- 4) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

a. Sub Bagian Umum dan Administrasi

Sub Bagian Umum dan Administrasi dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Administrasi untuk dijadikan acuan kerja;
- 2) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Administrasi;
- 5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokoknya.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Perencanaan untuk dijadikan acuan kerja;
- 2) Penyusunan anggaran Inspektorat;
- 3) Penyiapan laporan statistik Inspektorat;
- 4) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana kerja tahunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk dijadikan acuan kerja;

- 2) Melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, BPK, BPKP dan pengawasan lainnya;
- 3) Pemberian dukungan terhadap operasional Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- 4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh 4 (empat) orang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada pada wilayah masing-masing.

Rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja tahunan dalam wilayah masing-masing;
- 2) Mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan yang ada dalam wilayah masing-masing;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur pada wilayah masing-masing;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi Organisasi

Inspektorat Kabupaten Jeneponto periode 2018-2022, mempunyai Visi:

“Mewujudkan Aparat Inspektorat Kabupaten Jeneponto Yang Bersih dan Berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan yang profesional”

2. Misi Organisasi

Adapun yang menjadi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto 2018-2022 adalah:

- 1) Meningkatkan Kemampuan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto melalui Pendidikan Fungsional baik Formal maupun Informal.
- 2) Meningkatkan Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto di Bidang Pengawasan Aparatur dan Keuangan dalam Rangka Menunjang Terciptanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

- 3) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi Terselenggaranya Manajemen Tertib Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 60 orang. Kuesioner yang disebar kepada responden akan diambil pada 7 hari berikutnya setelah diisi oleh responden. Cara ini dipilih untuk mendapatkan kepastian perolehan data dan efisiensi waktu. Berikut ini adalah rincian perolehan data hasil penyebaran kuesioner di BPKAD Kabupaten Jeneponto dan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto :

Tabel 4.1
Proses Pembagian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	60
Kuesioner yang kembali	51
Kuesioner yang bisa diolah	51
Presentase	85%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2019

Tabel 4.1 tentang pengembalian kuesioner, dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 51 (85%). Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, diperoleh data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	22	43%
Perempuan	29	57%
Total	51	100%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 29 orang (57%) dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (43%).

b. Usia Responden

Tabel 4.3

Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
30-35	10	20%
36-41	14	27%
42-47	12	24%
>48	15	29%
Total	51	100%

Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2019

Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia 30-35 tahun sebanyak 10 orang (20%), dilanjutkan dengan usia 36-41 tahun sebanyak 14 orang (27%), dilanjutkan dengan usia 42-47 tahun sebanyak 12 orang (24%), dan yang berusia >48 sebanyak 15 orang (29%).

c. Pendidikan Responden

Tabel 4.4

Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SLTA	4	8%
S1	22	43%
S2	25	49%
Total	51	100%

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah, 2019

Tingkat pendidikan responden rata-rata tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 terdapat 25 orang atau 49% dari responden berpendidikan S2, 22 orang atau 43% responden berpendidikan S1, sedangkan sisanya yaitu 4 orang atau 8% responden berpendidikan SLTA.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali,2016). Uji normalitas yang digunakan oleh penulis adalah *Test of Normality Kolmogrov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogrov-Smirnov dan dibandingkan dengan nilai α yaitu 0,05 (Ghozali,2016). Berikut ini adalah hasil pengujian *Kolmogrov-Smirnov* dengan SPSS 24 :

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,03914205
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,044
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,078 dengan signifikan pada 0,200. Jika dibandingkan dengan nilai 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka data tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dengan SPSS :

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-2,678	7,114		-,376	,708		
	SAK	,457	,200	,293	2,285	,027	,833	1,200
	SPI	,544	,173	,403	3,146	,003	,833	1,200

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

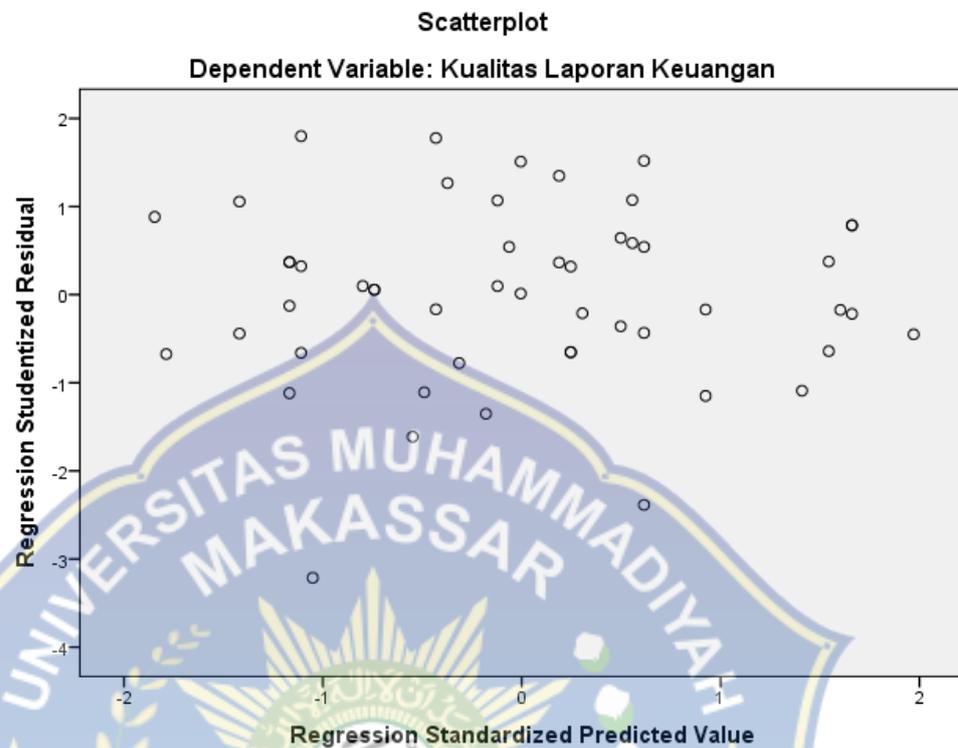
Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinearitas diatas diketahui nilai tolerance pada masing-masing variabel $> 0,1$, sedangkan untuk nilai VIF pada masing-masing variabel < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antara pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2013: 139-143). Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS :

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Grafik menunjukkan bahwa pada semua setiap nilai prediksi, nilai residu memiliki variasi residu yang sama. Model regresi layak untuk dipakai, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu satu model yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Dengan bantuan program SPSS versi 24 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,678	7,114		-,376	,708
	SAK	,457	,200	,293	2,285	,027
	SPI	,544	,173	,403	3,146	,003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Hasil output pada tabel 4.7 diatas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = -2,678 + 0,457 + 0,544 + e$$

Berdasarkan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta bernilai -2,678. Nilai tersebut berarti tingkat variabel bebas (sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern) konstan atau sama dengan nol (0), maka rata-rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar -2,678 satuan.
- 2) Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah bernilai positif sebesar 0,457. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) akan meningkatkan nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,457.
- 3) Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 0,544. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada variabel sistem pengendalian intern (X2) akan meningkatkan

nilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,544.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t_{hitung} ini ada pada output perangkat lunak, dapat dilihat pada tabel *coefficient level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut adalah hasil output uji t dengan menggunakan program SPSS versi 24 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Statistik t

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-2,678	7,114		-,376
	SAK	,457	,200	,293	2,285
	SPI	,544	,173	,403	3,146
					Sig.
					,708
					,027
					,003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Dasar pengambilan keputusan uji t sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

- 2) Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Rumus mencari t_{tabel} adalah :

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= t(\alpha : n-k-1) \\ &= t(0,05: 51-2-1) \\ &= t(0,05 : 48) \\ &= 1,677 \end{aligned}$$

Maka t_{tabel} dalam penelitian ini adalah 1,677

Keterangan :

α = Tingkat kepercayaan

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel X

Berdasarkan hasil output uji-t di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki t_{hitung} 2,284 > t_{tabel} 1,677 dengan signifikan sebesar 0,027 lebih kecil dibandingkan probabilitas (α) 0,05. Berdasarkan uji hipotesis diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Hasil pengujian Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai t_{hitung} 3,146 > t_{tabel} 1,677 dengan signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan (α) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua (H₂) diterima.

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil output dari perangkat lunak, dapat dilihat pada tabel ANOVA. Apabila F_{hitung} > F_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS versi 24 sebagai berikut :

Tabel 4.9

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109,075	2	54,538	12,591	,000 ^b
	Residual	207,905	48	4,331		
	Total	316,980	50			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SPI, SAK

Dasar pengambilan keputusan uji F sebagai Berikut :

- 1) Jika nilai sig < 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- 2) Jika nilai sig > 0.05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Rumus mencari F_{tabel} adalah :

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= F(k : n-k) \\
 &= F(2 : 51-2) \\
 &= F(2 : 49) \\
 &= 3,19
 \end{aligned}$$

Maka F_{tabel} dalam penelitian ini adalah 3,19

Keterangan :

k = Jumlah variabel X

n = Jumlah sampel

Berdasarkan hasil output uji F di atas dapat disimpulkan bahwa uji anova atau F test menghasilkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan $F_{hitung} 12,591 > F_{tabel} 3,19$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis I dapat dilihat nilai signifikansi untuk sistem akuntansi keuangan sebesar 0,027 lebih besar dari 0,05, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis $H_0 : \beta_1 = 0$ ditolak dan hipotesis $H_1 : \beta_1 \neq 0$ diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antar sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Rika Krisna yang berjudul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelolalaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis II dapat dilihat nilai signifikansi untuk sistem pengendalian intern sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, hipotesis $H_0 : \beta_2 = 0$ ditolak dan $H_2 : \beta_2 \neq 0$ diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Jeneponto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis III dapat dilihat nilai signifikan untuk sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara simultan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jika nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara bersama-sama (simultan) variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, hipotesis $H_0 : \beta_{1.2} = 0$ ditolak dan hipotesis $H_3 : \beta_{1.2} \neq 0$ diterima. Artinya secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gysheila Smylie Lumintang, Linda Lambey, dan Steven J. Tangkuman dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Manado). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H₂) menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak, yaitu :

1. Bupati sebagai kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.
2. DPRD sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi aspirasi rakyat. Apar pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan bersama dengan lembaga legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat.
3. Untuk mengandakan pendidikan dan pelatihan tentang software akuntansi ataupun sistem akuntansi keuangan, sehingga setiap satuan kerja di BPKAD Kabupaten Jeneponto memiliki pemahaman tentang software akuntansi ataupun sistem akuntansi keuangan sehingga dapat mempermudah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Meningkatkan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dapat berjalan dengan baik, serta komitmen pimpinan dan karyawan-karyawan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Sistem Pengendalian Intern, dengan komitmen suatu keputusan yang akan diambil terkait perbaikan pengendalian intern, prosedur dan aturan akan dilaksanakan untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi/instansi pemerintah.
5. Peneliti berikutnya dapat lebih memperhatikan kuesioner setiap variabel, sebaiknya menggunakan kuesioner baru yang sesuai dengan

kondisi suatu daerah sehingga mendapat gambaran permasalahan yang sebenarnya. Serta dapat mempertimbangkan atau menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum diteliti dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rai, I Gusti. 2010. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastran, Indra, dan Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dadang, Dailibas. 2013. *Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta : PPM Manajemen.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Handani, Yayah. 2011. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1 Februari 2009.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009. Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Kadmadi dan Nia Siti Sunariah. 2016. *Panduan Modern Peneitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Merialsa, Asmara Intan. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Dan BPKAD Kota Bandung). Bandung : Universitas Pasundan.
- Moh. Mahsun, Firma, Heribertus. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga, Cetakan Keenam. Yogyakarta : BPFE.
- Mudrajad. 2018. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Subekti, Ika Arifanny, Fahmi, dan Rifqi. Novriyandana. (2015). Pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Banjarmasin (Studi persepsi pengguna eksternal laporan keuangan Kota Banjarmasin).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.





Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu
Pejabat/Pegawai
Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto

Perihal : Permohonan Mengisi Kuesioner Penelitian

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Asma Fauziyyah
NIM : 105730536615
Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. terkait hal tersebut diatas, perlu saya sampaikan bahwa kuesioner ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga informasi yang saya peroleh dari Bapak/Ibu akan saya pergunakan sesuai dengan kode etik penelitian.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih

Makassar, 13 Mei 2019

Peneliti

Ridha Asma Fauziyyah
NIM: 105730536615

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner Penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”* Pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Besar harapan saya kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk menjawab pertanyaan kuesioner ini dengan baik. Atas waktu dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

A. Data Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* (√) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
4. Lama Waktu Kerja : ≤ 5 Tahun > 5 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : SMP/SMA Diploma
 S1 S2
 S3
6. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen
 Ilmu Ekonomi Hukum
 Teknik Pertanian
 Dan lain-lain
7. Jabatan :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu kolom yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

- | | | | |
|-----|-----------------------|----|-----------------|
| STS | : Sangat Tidak Setuju | S | : Setuju |
| TS | : Tidak Setuju | SS | : Sangat Setuju |
| N | : Netral | | |

1. Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Relevan						
1.	Laporan keuangan yang kami susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Laporan keuangan yang kami susun selesai tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>)					
Andal						
3.	Informasi yang kami sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4.	Informasi yang kami sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
Dapat Dibandingkan						
5.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang kami susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6.	Dalam penyusunan laporan keuangan, kami telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dari tahun ke tahun.					
Dapat Dipahami						
7.	Laporan yang kami buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami					
8.	Informasi yang kami sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

Sumber : Ni Made Sudiarianti, dkk (2015)

2. Pengukuran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Pencatatan						
1.	Melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi di Inspektorat Daerah					
2.	Setiap pencatatan transaksi yang ada disertai oleh bukti					
3.	Pencatatan yang dilakukan pada Inspektorat Daerah kami secara kronologis					
Penggolongan dan Pengikhtisaran						
4.	Melakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi pada setiap transaksi keuangan yang terjadi di Inspektorat Daerah					
5.	Melakukan klasifikasi pada setiap transaksi yang terjadi					
Pelaporan						
6.	Laporan keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Daerah kami dilakukan setiap periode akuntansi					
7.	Pelaporan laporan keuangan pada Inspektorat Daerah kami dilakukan secara konsisten dan periodik					

Sumber : Putri Novia Fajar Rini (2017)

3. Pengukuran Sistem Pengendalian Intern (X2)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Lingkungan Pengendalian						
1.	Pimpinan Inspektorat Daerah selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian					
2.	Inspektorat Daerah telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
Penilaian Risiko						
3.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi					
4.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Kegiatan Pengendalian						
5.	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada Inspektorat daerah selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas.					
6.	Instansi Pemerintahan telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi.					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan seluruh komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.					
8.	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
Pemantauan Pengendalian Intern						
9.	Inspektorat Daerah menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian.					
10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					

Sumber : Ni Made Sudiarianti, dkk (2015)

Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Jumlah Responden	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)							Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	4	5	4	5	4	4	5	31
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	5	5	4	5	4	5	4	32
4	4	4	4	4	5	4	4	29
5	5	4	4	4	4	4	5	30
6	5	5	4	5	4	5	5	33
7	4	5	4	4	4	4	4	29
8	4	4	5	4	5	4	5	31
9	4	3	4	4	4	4	4	27
10	4	4	5	4	4	4	4	29
11	5	4	4	4	4	4	5	30
12	4	5	4	4	4	4	4	29
13	4	4	5	5	4	5	4	31
14	5	4	4	4	5	4	4	30
15	4	4	4	5	4	4	4	29
16	5	5	4	4	4	5	4	31
17	4	4	5	4	4	4	5	30
18	4	4	5	4	5	4	4	30
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	5	4	4	4	4	4	5	30
21	4	4	4	4	4	5	4	29
22	5	4	4	4	4	4	4	29
23	4	5	4	5	4	4	4	30
24	5	4	4	5	4	4	4	30
25	4	5	5	4	4	4	5	31
26	5	4	4	5	4	4	5	31
27	4	5	5	4	4	4	5	31
28	4	4	4	4	5	4	5	30
29	4	4	5	4	5	4	4	30
30	5	5	5	4	4	4	4	31
31	5	5	4	4	5	5	5	33
32	4	5	4	5	4	5	4	31
33	4	4	4	4	4	5	4	29
34	4	4	4	5	4	4	4	29
35	5	4	4	5	4	4	5	31
36	4	5	4	4	5	4	5	31
37	4	5	4	5	4	4	4	30

38	5	5	5	4	4	4	5	32
39	4	4	5	4	4	3	4	28
40	4	4	5	4	5	4	4	30
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	5	5	4	5	4	4	31
43	4	4	4	4	4	4	5	29
44	5	4	4	4	5	4	4	30
45	4	4	4	4	5	5	4	30
46	4	3	4	4	4	4	4	27
47	5	4	4	4	4	4	4	29
48	5	4	4	4	5	5	4	31
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	5	4	4	4	5	4	31
51	4	4	4	5	4	4	4	29

2. Sistem Pengendalian Intern (X2)

Jumlah Responden	Sistem Pengendalian Intern (X2)										Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	43
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	5	43
6	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	41
9	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42
10	4	5	5	4	4	5	5	3	4	4	43
11	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
12	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	40
13	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43
14	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	44
15	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
16	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
17	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	40
18	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
19	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
20	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	39
23	4	4	4	5	4	2	4	4	5	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39

12	4	4	4	5	4	4	4	5	34
13	5	5	4	5	4	5	4	4	36
14	4	5	4	4	5	4	4	4	34
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	4	5	4	4	5	4	4	5	35
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	4	4	4	5	4	4	5	35
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	5	4	4	5	5	5	5	37
21	5	5	4	4	4	4	5	5	36
22	4	4	5	4	4	3	4	4	32
23	4	4	4	4	4	5	4	4	33
24	4	4	5	5	4	4	5	5	36
25	4	4	5	5	5	4	4	4	35
26	4	5	5	4	4	4	4	5	35
27	4	4	4	4	4	4	5	4	33
28	4	4	5	4	4	4	5	4	34
29	4	4	5	5	4	4	5	5	36
30	4	4	4	4	5	4	5	4	34
31	4	4	4	4	5	4	5	5	35
32	4	4	4	4	5	4	5	4	34
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	4	5	4	4	5	4	5	5	36
37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	5	4	4	4	5	4	5	4	35
41	4	4	4	4	4	4	4	4	32
42	5	5	4	4	5	5	4	4	36
43	4	5	4	4	4	4	5	4	34
44	4	5	4	4	5	4	4	4	34
45	4	5	4	4	4	3	4	4	32
46	5	2	2	2	3	5	3	3	25
47	4	2	3	4	4	4	4	4	29
48	4	4	5	4	4	4	4	4	33
49	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	3	3	4	4	4	4	4	4	30
51	5	4	5	4	4	4	3	4	33

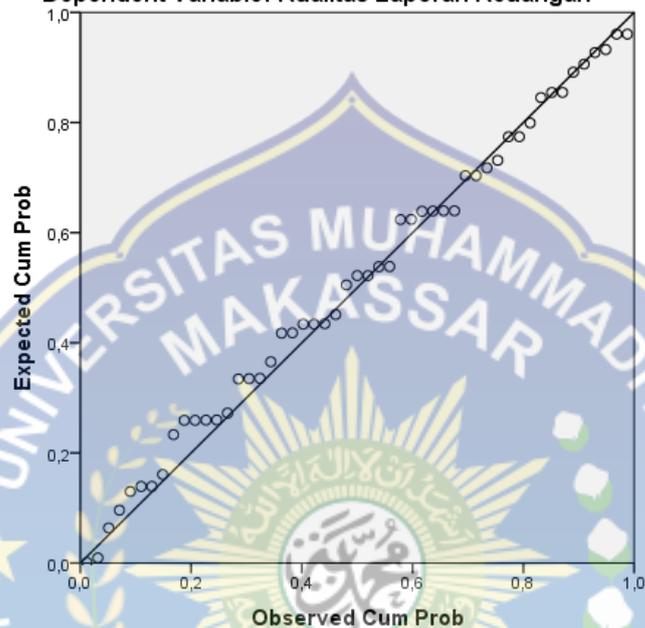
Lampiran 3 : Deskriptif Statistik

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



b. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,03914205
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,044
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

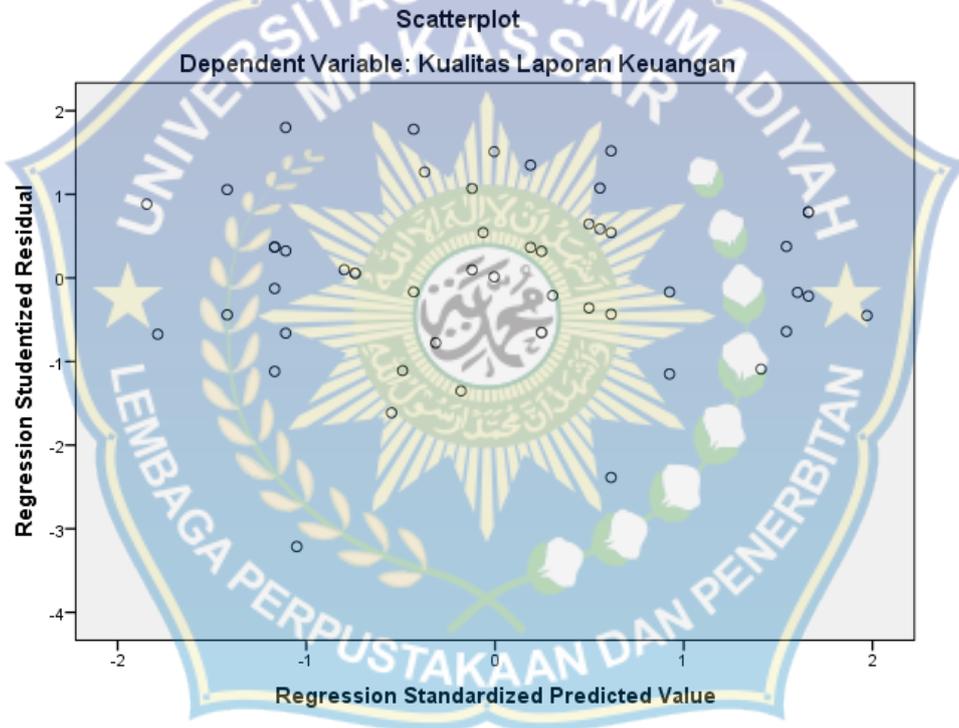
d. This is a lower bound of the true significance.

c. Uji Multikolonelitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,678	7,114		-,376	,708		
	SAK	,457	,200	,293	2,285	,027	,833	1,200
	SPI	,544	,173	,403	3,146	,003	,833	1,200

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

d. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



e. Uji Heteroskedastisitas Glajser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	5,065	4,461		1,135	,262
	SAK	-,121	,126	-,151	-,965	,339
	SPI	,002	,108	,003	,020	,984

a. Dependent Variable: Abs_Res

2. Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-2,678	7,114		-,376	,708
	SAK	,457	,200	,293	2,285	,027
	SPI	,544	,173	,403	3,146	,003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	109,075	2	54,538	12,591	,000 ^b
	Residual	207,905	48	4,331		
	Total	316,980	50			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SPI, SAK

Koefisien Diterminasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,587 ^a	,344	,317	2,081	1,903

a. Predictors: (Constant), SPI, SAK

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 5 4 8 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15244/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1315/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 30 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RIDHA ASMA FAUZIYAH**
Nomor Pokok : 10573 0536615
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Mei s/d 04 Juli 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513-199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp (0419) 21022 Kode Pos 92311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 202/BPKAD/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SULAEMAN, S.Kom, M.A.P**
NIP : 19750505 200502 1 007
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Plh. Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **RIDHA ASMA FAUZIYYAH**
NIM : 105730536615
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mulai tanggal 04 Mei s.d 04 Juli 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 08 Agustus 2019



Plh. KEPALA BADAN

SULAEMAN, S.Kom, M.A.P.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750505 200502 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 01 Telp/Fax. (0419) 21604 Kode Pos 92311 Jeneponto

SURAT KETERANGAN

No : 800/643 /ITKAB/VI/2019

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **H. M. YUSUF PAKIHI, SH, M.AP**
NIP : 19640519 199309 1 001
PANGKAT / GOL. : Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN : Inspektur Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : **RIDHA ASMA FAUZIYYAH**
NIM : 105730536615
FAKULTAS/PRODI/UNIVERSITAS : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi / Universitas Muhammadiyah
Makassar

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi mulai tanggal 04 Mei s/d 04 Juli 2019 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 10 Juni 2019

INSPEKTUR,

H. M. YUSUF PAKIHI, SH, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19640519 199309 1 001

BIOGRAFI PENULIS



Ridha Asma Fauziyyah panggilan Ridha lahir di Jeneponto tanggal 26 Juni 1997 dari pasangan Bapak Juhasdi, S.Sos dan Ibu Sitti Rosminah, S.Pd. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Sultan Alauddin 3 A, Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDI 227 Romanga lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Binamu lulus tahun 2012, SMA Negeri 1 Binamu lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

